

## TINGKATKAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN, TNI BANTU WARGA MEMBANGUN JALAN RABAT BETON



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/05/Gambar-WhatsApp-2024-05-10-pukul-20.03.12\\_b97467a4.jpg?w=1504&ssl=1](https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/05/Gambar-WhatsApp-2024-05-10-pukul-20.03.12_b97467a4.jpg?w=1504&ssl=1)

### **Isi Berita:**

KEBUMEN, Kebumen24.com – Untuk membantu masyarakat dalam Meningkatkan produktifitas pertanian, ratusan personil anggota TNI bergotong royong membangun jalan rabat beton sepanjang 750 meter. Jalur yang sebelumnya rusak berat dan sulit dilalui warga, sehingga distribusi pertanian tersendat.

Dandim 0709 Kebumen Letkol Czi Ardianta Purwandhana menjelaskan, pembangunan jalan yang berada di Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dibangun melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) sengkuyung Tahap 2 tahun 2024. Pembangunan sendiri dimulai pada Rabu kemarin, dan diperkirakan selesai pada tanggal 6 juni mendatang.

Ratusan personil TNI bersama dengan masyarakat bergotong royong membangun jalan rabat beton sepanjang 750 meter, lebar tiga meter dengan ketebalan 0,15 meter. Pembangunan tersebut memakan anggaran sebesar Rp 581 juta yang bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan juga APBDes.

Rencananya usai jalan tersebut selesai dibangun, akan digunakan untuk meningkatkan

produktifitas pertanian dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

” Ya kita pada saat ini kita membangun jalan di desa Jembangan 750 meter dengan lebar lima meter dan ketebalan 0,15 mter, jadi intinya TNI dengan dibantu oleh pemerintah daerah bersama masyarakat bersama kepolisian dan unsur-unsur lainnya,” ucap Dandim.

Kepala Desa Jembangan Muholis mengatakan, Jalan ini merupakan akses utama warga dan menjadi penghubung tiga desa yakni Jembangan, Desa Tegalrejo dan Desa Karangtengah. Jalan ini sebelumnya rusak berat, karena tergerus air saat hujan deras terjadi, bahkan beberapa lajur tampak miring dan sangat berbahaya untuk dilalui.

Terlebih Jalan ini juga, merupakan jalur ekonomi, pendidikan, dan juga pertanian bagi warga setempat. Warga masyarakat di tiga desa tersebut bergotong royong, bersama para anggota TNI untuk mewujudkan jalan mulus, dan nyaman dilalui.

Masyarakat melalui kepala Desa Jembangan, menyampaikan terimakasih kepada personil anggota TNI dan juga pemerintah daerah.

“Ini penghubung antara desa kami dan tiga desa lainnya, kita bersama sama bergotong royong bahu membahu dari ketiga desa itu, dalam arti dalam bentuk tenaga dari desa Karangtengah dan desa lainnya,” ujar Kepala Desa Jembangan.

Sementara itu wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih mengapresiasi para personil TNI dalam kegiatan TMMD sengkuyung tahap dua. Ia juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran TNI Polri, yang telah mendukung Pembangunan di Kabupaten Kebumen.

” Ini menunjukkan sinergitas gotong royong yang menjadi semangat kita yang menjadi akselerasi pembangunan di Kabupaten Kebumen,” ungkapnya.(k24/\*).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/05/11/tingkatkan-produktifitas-pertanian-tni-bantu-warga-membangun-jalan-rabat-beton/>, “Tingkatkan Produktifitas Pertanian, TNI Bantu Warga Membangun Jalan Rabat Beton”, tanggal 11 Mei 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=eP4sHU-F5Xc>, “Tmmd Sengkuyung Tahap Ii, Kodim Kebumen Bangun Jalan Desa Jembangan”, tanggal 8 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*